

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERNYATAAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
INTISARI.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
A. Tinjauan Umum Tentang Asas-asas Umum Kepailitan dan PKPU	16
1. Pengertian Kepailitan.....	16
2. Pengertian PKPU.....	19
3. Asas-asas Umum Hukum Kepailitan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan dan PKPU Indonesia.....	24
1. Asas-asas UUK PKPU.....	24
2. Syarat-syarat dijatuhinya pailit.....	25
3. Akibat pernyataan pailit bagi debitor.....	26
4. Syarat-syarat dijatuhinya PKPU.....	27
5. Akibat hukum pernyataan PKPU.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Kepailitan dan PKPU	30
D. Tinjauan Umum Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU.....	32

1. Definisi Perdamaian.....	32
2. Syarat Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Bahan Penelitian.....	37
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data Penelitian.....	40
D. Analisis Hasil Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kajian Kritis Pengaturan mengenai perdamaian berdasarkan UUK PKPU.....	43
1. Ketentuan mengenai prosedur pengajuan proposal perdamaian di dalam UUK PKPU.....	43
2. Ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan homologasi (pengesahan rencana perdamaian) di Pengadilan Niaga di dalam UUK PKPU.....	48
3. Kajian Kritis Mengenai Ketentuan Syarat-syarat Disahkannya Proposal Perdamaian di dalam UUK PKPU.....	50
3a. Ketidadaan Larangan Mengenai Pembuatan Proposal Perdamaian Yang Tidak Memberikan Perlakuan Yang Setara Bagi Setiap Kreditor.....	60
4. Refleksi kritis paradigma yang digunakan dalam UUK PKPU Dalam kaitannya dengan ketidaksetaraan posisi antar kreditor konkuren.....	69
5. Kajian Singkat Perbandingan Hukum Antara UUK PKPU dengan <i>Chapter 11 U.S Bankruptcy Code</i> dan <i>German Insolvency code</i> mengenai <i>composition plan</i> (rencana perdamaian).....	83
6. Studi Kasus Singkat Mengenai Pandangan Majelis Hakim tentang Penerapan Syarat-syarat Disahkannya Rencana Perdamaian	91
B. Rekomendasi Reformulasi Pengaturan Syarat-syarat Disahkannya Rencana Perdamaian Dalam UUK PKPU yang Memberikan Kepastian dan Keadilan dalam Pemenuhan Piutang Kreditor	103
1. Penambahan Ketentuan Mengenai Syarat-syarat Disahkannya Proposal Perdamaian Agar Lebih Memberikan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelaksanaan Perdamaian.....	104
2. Penambahan Ketentuan Mengenai Syarat-syarat Disahkannya Proposal Perdamaian Agar Lebih Memberikan Keadilan Bagi Seluruh Kreditor.....	121
BAB V PENUTUP.....	131

A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135